

# Indonesia harus tingkatkan anggaran untuk sektor pertahanan maritim



*Dokumentasi KRI  
Tjiptadi-381  
(kanan) dan KRI  
Teuku Umar-385  
(kiri) saat layar  
lintas di Laut  
Natuna,  
Kepulauan Riau,  
Rabu (15/1/2020).  
ANTARA  
FOTO/M Risyah  
Hidayat*

Pakar  
ekonomi  
maritim dari  
Universitas  
Sultan  
Agung  
Semarang,

Prof La Ode Masihi Kamaluddin, mengatakan, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, harus bekerja sama dalam meningkatkan anggaran untuk sektor pertahanan maritim.

Hal itu ia jelaskan dalam paparannya soal sistem ketahanan ekonomi maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya Laut China Selatan.

"Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu kosong, kapal-kapalnya tidak begitu banyak. Karena itu, haruslah dibangun titik-titik (ketahanan) untuk ekonominya," ujar Kamaluddin, dalam diskusi Konflik Natuna dan Pasang Surut Hubungan Indonesia dan RRC, di Jakarta, Jumat.

Ia meminta secara khusus kepada Panglima Komando Armada I TNI AL, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, hal itu dapat disampaikan kepada Subianto agar dapat diperhatikan.

Sebagai salah seorang pemerhati di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia ingin kedua menteri itu bisa menjalin kerja sama dalam menarik investasi industri dalam bidang pertahanan kelautan.

"Jadi KKP menyiapkan kapal-kapal ikannya, dan swasta menyiapkan industri pengolahan (ikan)-nya, agar sebagian keuntungannya itu (dapat) digunakan oleh TNI AL," kata Kamaluddin.

Ia memperhatikan selama ini TNI AL kekurangan amunisi anggaran. Akibatnya, dalam persediaan bahan bakar minyak untuk operasionalnya saja tidak cukup kalau mengandalkan APBN saja. "Kalau dari APBN saja tidak cukup itu. Itu nyata. Jadi (BBM) itu, dari (keuntungan investasi) itu saja," kata dia.

Menanggapi itu, Ali mengatakan fakta di lapangan memang terjadi hal demikian, kendati TNI tidak mungkin menyuarakan bahwa institusinya kekurangan anggaran.

"Itu biar bapak-ibu saja yang menyuarakan, kami kan tidak mungkin bersuara kalau kami ini kekurangan anggaran," ujar dia, dalam diskusi yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu.

Terkait soal BBM, di Natuna memang ada penerapan kebijakan terkait konsumsi minyak yang harus Biodiesel B20 atau bahkan B30, Sementara kapal-kapal Indonesia masih sedikit yang sudah dimodifikasi agar dapat menggunakan Biodiesel B20 atau B30 persen itu.

"B20 tidak ada di Natuna. Ini juga suatu kendala. Akhirnya kemarin pada saat operasi (di Natuna), kami bawa kapal tanker kita. Jadi dia mengisi bahan bakar dari kapal tanker itu," kata Ali.

Ia juga mengusulkan agar dapat dibangun tangki timbun di Natuna untuk stok bahan bakar supaya operasional pertahanan maritim di wilayah Natuna berlangsung lebih lama serta lebih jauh.

"Mungkin (operasionalnya) sampai *high seas* atau laut lepas," kata Ali.